BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Apa relevansinya dengan KP ini?

Pada zaman Belanda pemungutan pajak telah dilakukan oleh suatu badan yang disebut *De Inspective Van Vinancien.* Namun pada zaman pendudukan jepang tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942 badan tersebut berganti nama menjadi *Zainebu.* Dan setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namanya diganti kembali menjadi Inspeksi Keuangan " yang bekedudukan di gedung *Concordian* yang sekarang dikenal dengan nama gedung Merdeka, Bandung.

UNIKOM

Pada tanggal 21 Agustus 1947 Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan ke Kabupaten Soreang. Tapi kemudian karena suatu alas an khusus pada tanggal 19 Agustus 1948 sebagian Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan ke Tasikmalaya dan sebagian lagi tetap berada di Bandung.

Namun pada akhirnya Kantor Inspeksi Keuangan yang bekedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Bandung, yang ber alamat di jl. Raya Barat yang sekarang dikenal dengan nama jl. Asia Afrika.

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan No.276/KMK/01/1979 Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak terhitung mulai tanggal 6 April 1979.

Brdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan No.276/KMK/1984, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya

menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). DI Bandung Kantor Pelayanan Pajak ini dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

1. KPP Bandung Timur, Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung
2. KPP Bandung Barat,. Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
3. KPP Bandung Tengah, Jl. Purnawarman No. 21 Bandung
4. KPP Cimahi, Jl. Raya Barat Cimahi

Kemudian pada tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung diperluas menjadi 5, yaitu :

1. KPP Bandung – Tegallega, Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
2. KPP Bandung Krees, Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying, Jl.Purnawarman No. 21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonegoro, Jl. Asia Afrika Bandung
5. KPP Cimahi, Jl. Raya Barat Cimahi

3.2. Struktur Organisasi KPP Tegallega

→ Dibuatkan gambar diagram struktur Org

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 276/KMK.01/1989, tanggal 25 Maret 1989 KPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan KPP Bandung-Tegallega menyusun struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala KPP Bandung Tegallega

Dipimpin oleh seorang kepala kantor

b. sub Bagian Umum

Dipimpin oleh seorang bagian yang bertugas dan bertanggungjawab penuh terhadap rumah tangga kantor yang dibantu oleh 3 orang kepala urusan, yaitu :

1. Urusan Tata Usaha Kepegawaian
2. Urusan Rumah Tangga
3. Urusan Keuangan

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri atas :

1. Sub seksi data masukan dan keluaran
2. Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
3. Sub seksi Penggalian Potensai Pajak dan ElstensifikasiWjib Pajak

d. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri atas :

1. Sub seksi Pelayana Terpadu (TPT)
2. Sub serksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
3. Sub seksi Ketetapan dan kearsipan wajib pajak

e. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terdiri atas :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PphOP
2. Sub seksi Veripikasi PPh Orang Pribadi

f. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terdiri atas :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
2. Sub seksi Veripikasi PPh Badan

g. Seksi Pemotongan danPemungutan Pajak Penghasilan, terdiri atas :

1. Sub sejsi Pengawasan Pembayaran Masa Potongan Pungutan PPh
2. Sub seksi Verifikasi Potongan Pungutan PPh

h. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), terdiri atas

1. Sub seksi PPN Industri
2. Sub seksi PPN Perdagangan
3. Sub seksi PPN jasa dan PTLL

i. Seksi Penagihan, terdiri atas :

1. Sub seksi Tata Usaha Piutang Pajak
2. S ub seksi Penagihan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

j. Seksi Penerimaan dan Keberatan,terdiri atas:

1. Sub seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Rekonsiliasi
2. Sub seksi Keberatan PPh
3. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL

Supaya lebih jelasnya akan diperlihatkan berdasarkan struktur organisasinya, sebagai berikut :

3.3 Uraian Tugas KPP Tegallega → di simpan di lampiran

a. Kepala KPP Bandung Tegallega , bertugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktipan serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.

2. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan juga sebagai pembina para pegawai.

3. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki wewenang untuk kemajuan KPP Bandung Tegallega.

b. Sub Bagian Umum

1. Urusan Kepegawaian, bertugas :

a. Mengatur ketertiban pegawai

b. Pengaturan urusan cuti pegawai

c. Pengaturan urusan kenaikan pangkat/jabatan

2. Urusan Rumah Tangga, bertugas :

Menyediakan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor

3. Urusan Keuangan, bertugas :

a. Mengatur pengurusan gaji pegawai

b. Mengatur pengurusan tunjangan pegawai

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bertugas :

1. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi

2. Melakukan urusan penggalian potensi perpajakan

3. Melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak

d. Seksi Tata Usaha Perapajakan (TUP), bertugas :

1. Melakukan urusan tata uasah wajib pajak

2. Penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan

3. Menerbitkan surat ketetapan pajak serta kearsipan wajib pajak

e. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi/Perseorangan, bertugas :

1. Melakukan urusan penata usahan SPT dan pengecekan SPT Masa

2. Menyusun dan memantau laporan pembayaran masa perseorangan

3. Melakukan verifikasi atauSPT Masa dan Tahunan PPh Orang Pribadi

f. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, bertugas :

1. Melakukan urusan penatausahaanSPT dan pengecekan SPT Masa
2. Memantau dan menyusun laporan masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan

g. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, bertugas :

1. Mengurus penatausahaan SPT
2. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa
3. Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan pemotingan dan pemungutan PPh

h. Seksi Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), bertugas :

1. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa
2. Memantau dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa
3. Melakukan verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya

i. Seksi Penagihan, bertugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan wajib pajak

j. Seksi Penerimaan dan Keberatan, bertugas :

1. Melakukan urusan tata usaha penerimaan
2. Melakukan restitusi
3. Melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak
4. Melakukan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan

1.4. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil pelaksanaan kuliah kerja praktek yang penulis dapat pada prosedur pemeriksaan SSP PPh pasal 21 adalah mengetahui system perpajakan di lapangan dengan system yang ada dalam teori perpajakan dibangku kuliah, walaupun di dalam kenyataan di laoangan menemukan berbagai kendala yang tidak sesuai dengan teori,misalnyakendala yang dialami penulis selama praktek kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Tegallega khususnya pada seksi Penerimaan dan Keberatan adalah dalam hal penyortiran dan pengarsipan kemudian masalah lain adalah area yang digunakan untuk tempat penyimpanan berkas yang akan disortir sangat sempit, adanya kekeliruan dalam penulisan judul map untuk Surat Setoran Pajak,adnya kekeliruan pencatatan SPT oleh wajib pajak yang membuat fiskus mengecek ulang data tersebut.

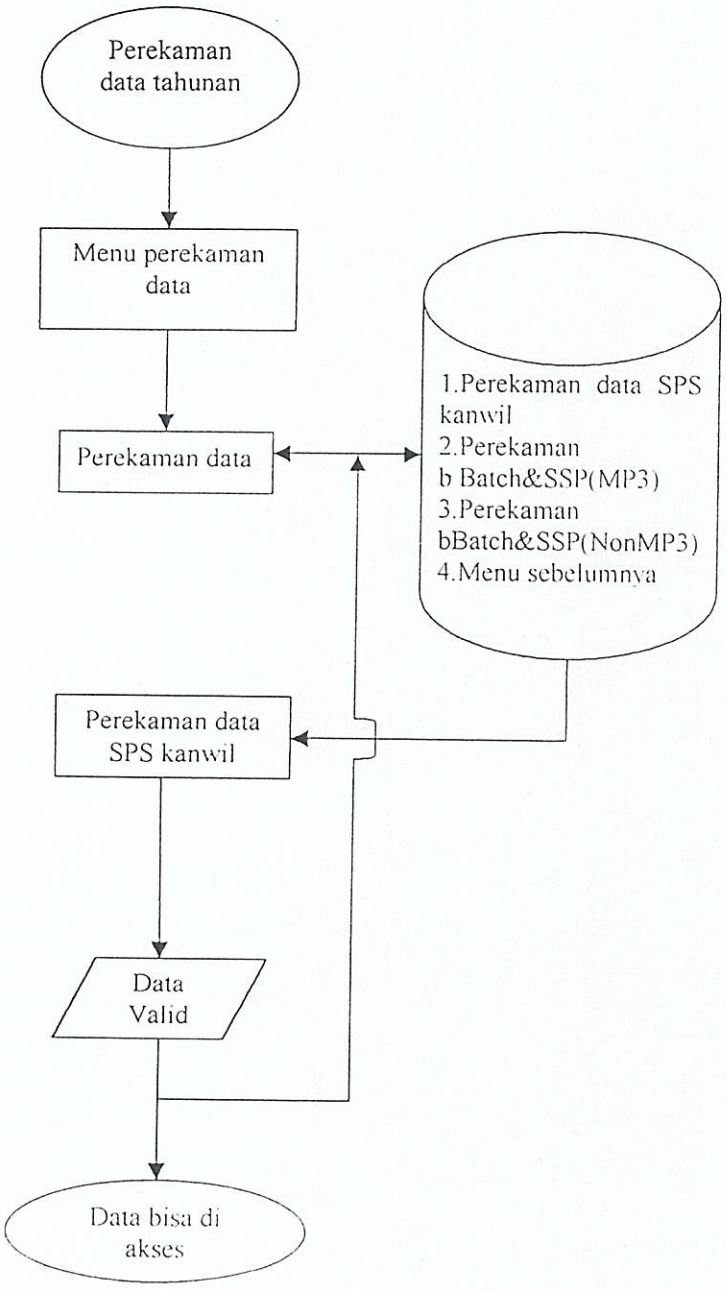
System pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self – Assement*, maka seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 21 bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikan kekantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam system ini wajib pajak aktif sedangkan fiskus mengawasi dan membimbing wajib pajak.

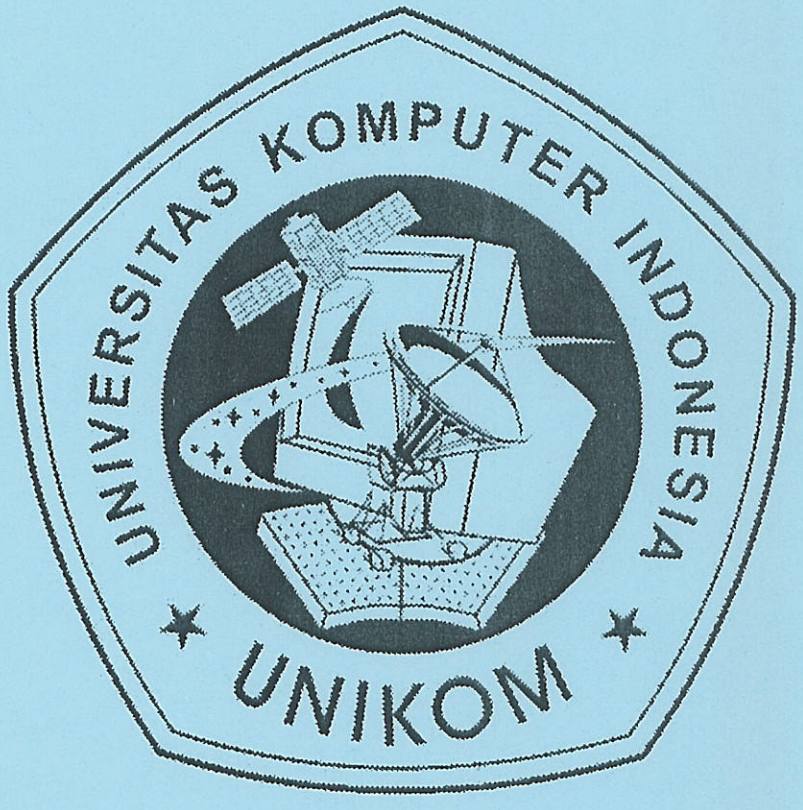
Melihat dari kekeliruan / kesalahan yang terdapat dilapangan, khususnya pada SPT yang dilakukan oleh wajib pajak maka perlu adanya pemeriksaan yang efisien oleh fiskus baik itu pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan,l sehingga data yang didapat pada Surat Setoran Pajak sudah sesuai dengan data yang sebenarnya.

Proses pemeriksaan pada khususnya pemeriksaan pembayaran PPh pasal 21 baik itu pemeriksaan kantor maupun lapangan, Kantor Pelayana Pajak Bandung-Tegallega telah melakukan sesuai dengan prosedur dan Undang-undang perepajakan yang berlaku.

3.5. FlowChart Perekaman Data




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM